

Tugas Perguruan Tinggi Seni

Tulisan ini merupakan tanggapan atas tulisan berjudul *ISI Butuh Rektor Petarung karva Aris Setiawan* yang terbit di Solopos 20 Agustus 2021 lalu. Perguruan tinggi seni di Indonesia bukan sekolah yang cuma untuk *klunang-kluning* dan *jingkrak-jingkrak*. Dari sejarah berdirinya, perguruan tinggi seni mengemban tugas besar kebangsaan. Sejarah didirikannya perguruan tinggi seni di Indonesia sedikit berbeda dari perguruan tinggi umum, yaitu mengemban amanat untuk menyemai, merawat, dan mengelola Indonesia sebagai bangsa dari sisi kultural.

Sebagaimana layaknya lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi seni juga memiliki tugas-tugas dan kewajiban umum menyiapkan mahasiswa agar cakap dan terampil bekerja dalam bidang yang digelutinya, mengembangkan kreativitas, dan memajukan ilmu pengetahuan.

Di luar tugas-tugas itu, perguruan tinggi seni memiliki tugas tambahan yang bersifat kebangsaan, yaitu mewujudkan dan mengelola apa yang oleh para *founding fathers* diimajinasikan sebagai kebudayaan nasional. Pertanyaannya adalah, bagaimana namanya dan sejarah mana yang mendasarinya?

Pentung untuk menilik sejarah berdirinya perguruan tinggi seni di Indonesia yang agak jarang ditengok. Perguruan tinggi seni di Indonesia yang awalnya hanya berjumlah lima, didirikan di Bandung (Institut Seni Budaya Indonesia/ISBI), Yogyakarta, Solo, Denpasar, dan Padang Panjang (Institut Seni Indonesia/ISI). Embrio kelima perguruan tinggi seni yang kini semua berstatus institut itu adalah lembaga-lembaga konservatori kesenian yang didirikan oleh pemerintah Orde Lama.

Lembaga-lembaga itu kemudian dikembangkan menjadi lembaga pendidikan tinggi bidang kesenian dengan status akademi (karawitan, tari, seni rupa). Kemudian secara bertahap statusnya ditingkatkan menjadi sekolah tinggi dan pada akhirnya menjadi institut. Selain dikembangkan menjadi lembaga pendidikan setingkat universitas, konservatori kesenian juga dikembangkan menjadi sekolah kesenian setingkat sekolah menengah yang kita kenal sebagai Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI).

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa



Budi Setiyono

Antropolog, pengajar di Program Studi Etnomusikologi ISI Solo

arti berdirinya lembaga konservatori itu dan dipilihnya kota-kota disebut dengan persoalan kebangsaan?

Menyemai Kebudayaan Nasional

Berdirinya konservatori karawitan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 97/K/50 di awal 1950-an menjadi tonggak awal bagi upaya merealisasikan kebudayaan nasional yang diimajinasikan. Perdebatan mengenai seperti apa seharusnya corak kebudayaan nasional telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka melalui polemik kebudayaan.

Perdebatan terjadi antara kelompok Pujangga Baru (diwakili oleh Sutan takdir Ali Syahbana) dan kelompok yang dianggap konservatif (seperti Soetomo dan Ki Hajar Dewantara). Mereka sama-sama galau tentang harus seperti apa kebudayaan Indonesia merdeka yang saat itu sedang samar-samar akan mawujud. Satu pihak (Pujangga Baru) menginginkan Indonesia menjadi negara modern dengan kiblat negara-negara Barat. Sedangkan pihak lain berpendirian bahwa Indonesia harus dibangun melalui perguruan yang dilandaskan filsafat timur yang disempurnakan.

Kelompok kedua ini menganggap Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara sebagai contoh model pendidikan yang ideal bagi Indonesia masa depan. Ki Hajar Dewantara kemudian mengajukan pandangan mengenai kebudayaan nasional yang menurutnya harus dibentuk dari puncak-puncak kebudayaan daerah.

Didirikannya lembaga-lembaga konservatori di lima kota menegaskan para *founding fathers* condong pada pilihan membangun kebudayaan nasional dari sumber kebudayaan daerah seperti pandangan Ki Hajar Dewantara. Bandung, Denpasar, Padang Panjang, Solo, dan Yogyakarta dipilih

sebagai lokus lembaga konservatori untuk dikembangkan menjadi perguruan tinggi seni. Pemilihan itu tampaknya dilandasi penilaian kota-kota tersebut merupakan representasi puncak pencapaian dari kebudayaan-kebudayaan daerah.

Kita boleh saling tidak bersepakat soal pilihan lokus, pengertian yang mendasarinya, dan strategi membentuk kebudayaan nasional. Tetapi faktanya jika kita berbicara mengenai kebudayaan nasional hari ini, selain bahasa Indonesia yang tentu semua bersepakat, acap kali kita merujuk produk-produk budaya yang digeluti kelima perguruan tinggi seni tersebut. Jadi sekali lagi, sejak berdirinya, lembaga yang dulu bernama konservatori karawitan dan kemudian dikembangkan menjadi perguruan tinggi seni dan sekolah menengah itu memang mengemban amanat kebangsaan menyemai kebudayaan nasional. Tentu selain tugas sebagaimana perguruan tinggi umum lainnya.

Tugas dan amanat itu semestinya tetap relevan hingga hari ini dan masa yang akan datang. Bahkan mungkin tugas itu menjadi semakin berat saat gelombang globalisasi dan gerakan-gerakan transnasional sudah menyusup sampai ke relung-relung paling tersembunyi.

Bertarung untuk apa?

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa perguruan tinggi seni (baca: ISI Solo) butuh pemimpin petarung, seperti yang ditulis oleh Saudara Aris Setiawan di harian ini beberapa waktu lalu?

Pertanyaan itu bisa dijawab dengan singkat dan sederhana. Pertama, tugas kebangsaan seperti dilukiskan di atas tampaknya tidak lagi dipahami oleh banyak pihak, termasuk mungkin pihak pembuat kebijakan dan pengambil keputusan di level negara. Dalam soal ini, seorang pemimpin perguruan tinggi seni harus harus merunut para tokoh terdahulu, beribaku untuk memahami

tugas perguruan tinggi seni yang saya sebut sebagai tugas kebangsaan itu.

Selama beberapa dekade yang lalu para tokoh perguruan tinggi seni sudah bertarung hebat untuk menyakinkan para pembuat kebijakan mengenai tugas kebangsaan tersebut. Hasilnya huruf "S" yang merupakan kependekan dari kata "Seni" tertera pada akronim IPTEKS. Ini adalah tanda bahwa seni sebagai sebuah disiplin telah diakui sejajar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada saat yang sama, ada pengakuan bahwa perguruan tinggi seni mengemban tugas kebangsaan yang tidak dibebankan kepada perguruan tinggi umum. Karena itu, parameter, prasyarat, dan aturan tertentu yang berlaku pada perguruan tinggi seni bersifat khusus. Beberapa contoh aturan khusus tersebut adalah aturan mengenai rasio dosen-mahasiswa, jumlah minimal mahasiswa dalam satu program studi, seleksi masuk calon dosen, dan beberapa aturan-aturan lain di perguruan tinggi seni yang tidak sama dengan aturan pada perguruan tinggi umum.

Tetapi entah kenapa aturan-aturan khusus semacam itu dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi berlaku. Apakah karena huruf "S" itu telah mangkir dari akronim "IPTEK" dan perguruan tinggi seni tidak lagi dibebani tugas kebangsaan, dan sebaliknya tugas kebangsaan cukup bertugas memproduksi sarjana yang cakap dalam bidang pekerjaan tertentu, ditambah mengembangkan ilmu pengetahuan?

Kedua, pertarungan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan diri sendiri. Seorang pemimpin perguruan tinggi seni, atau sekurang-kurangnya ISI Solo, harus menjadi petarung untuk menaklukkan lingkungannya agar ikhlas membuka diri, bahwa seni tidak melulu soal ekspresi estetika individu, apalagi hiburan.

Bahwa jika berbicara soal konteks Nusantara misalnya, seni bisa saja merupakan sebuah perwujudan dari keluhuran peradaban politik, sebuah mekanisme mengelola komunitas, sebuah siasat perlawanan, dan masih banyak kemungkinan dugaan lainnya yang menunggu untuk dijelaskan atau ditafsir. Tugas-tugas seperti yang disebut di atas tentu saja tidak ada petunjuk dari institusi bagian dari kementerian, sehingga dilaksanakan ataupun tidak tidak akan mendapat hukuman atau hadiah.